KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

OLEH

FAVIOLA ID'HARETNA SARI

RISMA ANANDA NUR M.

AYSHA DIAH GARNIS P.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KabupatenTulungagung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 50 wajib pajak. Metode pengumpulan data yaitu dengan sebarangket/kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kelebihan menggunakan metode ini yaitu karena pengumpulan data dapat lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran warga Tulungagung terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sangat tinggi. Berdasarkan informasi dari SamsatTulungagung dari total target PKB pada tahun 2020 sudah tercapai95,76%. Dengan jumlah capaian itu dapat diartikan antusiasme masyarakat Tulungagung untuk bayar pajak itu tinggi dan sangat antusiasme membayar pajak.

Kata Kunci : Pajak, kendaraan, bermotor, metode

ABSTRACTION

This study aims to obtain empirical evidence regarding the awareness of taxpayers in paying motorized vehicle taxes in Tulungagung Regency. The theory used in this research is Theory of Planned Behavior. The number of samples studied was 50 taxpayers. The method of collecting data is by distributing questionnaires, which is a method of collecting data by giving a set of questions or written statements to the respondent to be answered. The advantage of using this method is that data collection can be more efficient if the researcher knows exactly what variables to measure and what is expected from the respondent. The results of this study indicate that the awareness of Tulungagung residents towards paying motor vehicle tax compliance is very high. Based on information from Samsat Tulungagung, the total PKB target in 2020 has reached 95.76%. With this number of achievements, it can be interpreted that the enthusiasm of the Tulungagung people to pay taxes is high and they are very enthusiastic about paying taxes.

Keywords : Taxes, vehicles, motorbikes, methods

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan Negara dari sector pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah. Memiliki Pendapatan Asli Daerah yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik pribadi, kelompok maupun badan/lembaga yang berdasarkan undang-undang. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diperoleh melalui pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Dewi, 2013)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah diantaranya yaitu di dapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Tabel 1.

**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017**

JenisKendaraan	2016	2017
Sepeda Motor	551 657	579 390
Mobil Penumpang	36 540	40 661
Mobil Roda 4	58 863	64 573
Colt station	-	-
Mobil Beban	20 966	22 455
Colt Pick Up	-	-
Bus	1 357	1 457
Ambulance	-	-
BecakRoda 3	-	-
Jumlah	669 383	708 536

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JawaTimur Resort Tulungagung

Tabel 1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 - 2017 mengalami peningkatan. Ada banyak factor-faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Juga dapat kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin banyak. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Tulungagung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang cukup banyak. Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor warga Tulungagung menempati peringkat ke - 4 di Jawa Timur. Dengan peringkat tersebut sudah dapat dipastikan kesadaran warga Tulungagung dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat tinggi juga sangat antusias dalam membayar pajak. Menurut

Adpel Samsat Tulungagung, M Chudori, antusiasme warga Tulungagung dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga didukung oleh kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan pemotongan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 15 persen dan kendaraan roda empat sebesar 5 persen. Kemudian dilanjutkan juga dengan pemutihan pembebasan denda pajak.

LANDASAN TEORI

A. JENIS PAJAK

1. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN berdasarkan Undang- Undang yang berlaku.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pembelian atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat mewah akan dikenakan PPN dan PPnBM. Adapun barang-barang yang tergolong mewah adalah sebagai berikut :

- Bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai (BM)

Pajak Bea Meterai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut :

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan“.

Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok diantaranya Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan. Namun, ada perubahan pada kategori sektor tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan (Sektor P2) telah masuk ke dalam kategori Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (Sektor P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat.

6. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Setiap daerah biasanya memiliki nama yang berbeda-beda atas Dinas atau Badan Pendapatan Daerah tersebut.

Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Pajak Propinsi
2. Pajak Kendaraan Bermotor
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Kabupaten/Kota
8. Pajak Hotel

9. Pajak Restoran
10. Pajak Hiburan
11. Pajak Reklame
12. Pajak Penerangan Jalan
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
14. Pajak Parkir
15. Pajak Air Tanah
16. Pajak Sarang Burung Walet
17. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
19. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

B. DASAR HUKUM PERPAJAKAN

Berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan kendaraan bermotor :

1. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dengan tegas mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

(“UU 22/2009”) Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009 yang berisi :

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b) Surat Izin Mengemudi;
- c) Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d) Tanda bukti lain yang sah

2. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor** (“Perkapolri 5/2012”), STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (kendaraan bermotor).

Sahnya STNK

Mengenai pengesahan STNK diatur dalam Pasal 70 UU 22/2009 sebagai berikut :

- a) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
- b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- c) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menmbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor, artinya STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan motor tersebut.

Lalu apa akibat dari tidak membayar pajak kendaraan bermotor? Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dan menunjukkannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tentu STNK yang dimaksud adalah STNK yang telah mendapat pengesahan setiap tahun yaitu dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Artinya, jika atas kendaraan bermotor tersebut belum dilakukan pembayaran pajak, maka pengemudi dianggap tidak dapat menunjukkan STNK yang sah.

3. Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan

Blanko Tilang bagian Pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menjelaskan bahwa sesuai Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

4. Pasal 260 ayat 1 UU 22/2009

Mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

- a) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan
- b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
- d) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti
- e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
- h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas
- i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

5. Pasal 288 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (5) huruf a UU 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sah (tidak sah karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor), maka penyidik dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan bermotor tersebut. Meskipun si pengendara motor memiliki SIM yang masih berlaku tidak menghapuskan unsur pelanggarannya.

Mekanisme Pemungutan PPnBM kendaraan bermotor

Berdasarkan KMK Nomor 355/KMK.03/2003 jo. KEP- 229/PJ/2003 diatur sebagai berikut :

1. PPnBM dikenakan atas :

- Impor kendaraan CBU (Completely Built-Up) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
- Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
- Penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan double cabin hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.

2. PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

- Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
- Kendaraan protokoler kenegaraan;
- Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;
- Kendaraan patroli TNI/POLRI.

3. Orang Pribadi (OP) atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud butir 2 di atas wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan

4. Permohonan SKB PPn BM yang diajukan oleh OP atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum ke KPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM;

- b) Fotocopy kartu NPWP
 - c) Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud
 - d) Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku
 - e) Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain :
 - Nama Penjual
 - Nama pembeli
 - Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli
 - f) Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (Ijin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
 - g) Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa :
 - Invoice
 - Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)
 - Dokumen kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan
 - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (LIC) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut
5. Permohonan SKB PPnBM dapat ditindak lanjuti dengan syarat bahwa OP atau Badan tersebut tidak mempunyai tunggakan hutang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. KPP memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
6. Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun sejak impor atau perolehannya dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPnBM terutang yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu bulan sejak kendaraan bermotor tersebut dipindah tangankan atau diubah peruntukannya. Dan apabila dalam jangka waktu satu bulan dimaksud PPnBM yang terutang tersebut tidak

atau kurang dibayar, KPP menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengecualian pengenaan PPnBM Kendaraan Bermotor

1. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa : kendaraan (ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, angkutan umum).
2. Impor atau penyerahan kendaraan yang Protokoler Kenegaraan; kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/Polri.
3. Apabila kendaraan diatas dalam jangka waktu 5 th sejak impor/ perolehannya dipindahtangankan , maka PPnBM yang terutang yang dibebaskan wajib dibayar ke kas negara dalam jangka waktu 1 bulan sejak kendaraan tersebut dipindah tangankan. Apabila dilanggar SKBKB + sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Prabowo, 2016)

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan berdasarkan hasil survey di Kantor SAMSAT Kabupaten Tulungagung.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 4 bulan, terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021 di Kantor SAMSAT Kabupaten Tulungagung.

3. Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data diambil secara langsung di Kantor SAMSAT Kabupaten Tulungagung. Hasil data yang diambil dengan cara melakukan survey langsung kepada para orang yang membayar pajak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

a) Wawancara

Menurut Lexy J Moleong (2005;186) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Informasi yang diperoleh dengan menggunakan wawancara antara lain : apakah membayar pajak itu penting? Apakah pernah membayar pajak terlambat? Bagaimana pelayanan Samsat?

b) Observasi

Observasi diartikan dengan melakukan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat, dan mempertimbangkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para pembayar pajak dan para petugas-petugas SAMSAT di Kabupaten Tulungagung saat melayani masyarakat.

PEMBAHASAN

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan Negara dari sector pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Tabel 2

Presentase Hasil Kuensioner

No	Keterangan	YA	TIDAK
1	Penting bayar pajak	100%	-
2	Kesadaran	100%	-
3	Kepatuhan	60%	40%
4	Pelayanan	-	-

DIAGRAM

Apakah membayar pajak itu penting?

Apakah kamu tahu bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu wajib?

**Apakah pernah
terlambat membayar
pajak kendaraan
bermotor**

**Bagaimana
menurutmu pelayanan
samsat Tulungagung?**

Pada diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu penting dan wajib. Tetapi masih ada beberapa orang yang tidak patuh dan telat membayar pajak kendaraan bermotor. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Tulungagung. Pengetahuan tentang pajak perlu dimiliki oleh wajib pajak agar dapat mengetahui hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak, sehingga tujuan pajak, fungsi serta manfaat pajak dapat dipahami dan dengan demikian timbul kesadaran untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti semakin tinggi pengetahuan pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Kt & Aryani, 2018)

Kemungkinan adanya sanksi perpajakan juga akan berpengaruh positif. Karena wajib pajak tidak akan melalaikan kewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi perpajakan akan lebih merugikan apabila melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya atau tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Berarti, semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Tulungagung. (Kt & Aryani, 2018)

Dan untuk pelayanan di Samsat Tulungagung sendiri para wajib pajak merasa pelayanannya sudah cukup bagus dan cukup memuaskan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh simpulan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Saran yang dapat disimpulkan dari tulisan diatas ialah Kantor SAMSAT Tulungagung diharapkan dengan rutin memberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat pajak. Dan SAMSAT Tulungagung bisa memberi penyuluhan di media sosial agar dapat menyampaikan pesan moral tentang pentingnya tanggung jawab dan pemeliharaan negara kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan perasaan sukarela dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan adanya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), segala bentuk prasarana umum yang berguna bagi masyarakat dapat dibangun sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dan kantor Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan ketegasan penerapan sanksi pajak bagi para pelanggarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. A. A. C. (2013). *ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011. 1*, 110–127.
- Kt, N., & Aryani, L. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : cknira64@yahoo.com / Telp : + 6285737795768 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive. 24*, 339–369.
- Prabowo, R. G. M. (2016). *Mekanisme PPN dan PPnBM*.
- <http://eprints.umpo.ac.id/3983/3/BAB%20II.pdf>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/3186/2/BAB%20I.pdf>
- <https://www.mendeley.com/catalogue/5015cd32-87e1-3ac7-8751-f4e631bb9885/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ba58ba818f25/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak-tahunan-kendaraan-bermotor/>
- <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/jenis-pajak-di-indonesia/>